

LITERATUR REVIEW: IMPLEMENTASI PENERAPAN EKONOMI SYARIAH DI PLN

Afristian Arief Dwiranda

afristian07@gmail.com

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

ABSTRAK

Sektor kelistrikan mengalami pertumbuhan yang stabil, didorong oleh pertumbuhan jumlah penduduk dan meningkatnya permintaan listrik akibat meningkatnya aktivitas dan infrastruktur. Salah satu perusahaan yang bergerak pada bidang kelistrikan adalah PLN. Sebagai negara mayoritas muslim membuat ketertarikan konsep ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, dimana perumusan masalah dalam penelitian kualitatif didapatkan karena adanya penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan, antara apa yang direncanakan dengan kenyataan, adanya pengaduan, dan kompetensi. PLN senantiasa mengacu pada nilai-nilai inti bisnis atau budaya perusahaan AKHLAK, sebagai landasan dalam berinteraksi dengan semua pihak dan menjadi inspirasi serta acuan pola pikir setiap insan perusahaan. Implementasi ekonomi syariah di perusahaan PLN juga tercermin dalam proyek-proyek yang menggunakan prinsip syariah. Proyek tersebut menggunakan pembiayaan investasi dalam skema syariah dengan besaran Rp2,84 triliun.

Kata kunci: Ekonomi Syariah, Energi, PLN.

PENDAHULUAN

Energi sebagai pilar fundamental bagi pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2019) melaporkan energi terbarukan mampu menghasilkan energi sebesar 442 gigawatt (GW) dan 200.000 barel per hari dalam bentuk biogas dan biofuel. Pada tahun 2018, dari total kapasitas pembangkitan sebesar 64,5 GW, sekitar 8,8 GW atau 14% di antaranya berasal dari energi terbarukan untuk menghasilkan listrik. Listrik merupakan salah satu sumber energi yang sangat vital dalam kehidupan sehari-hari, ini terjadi karena listrik digunakan untuk menggerakkan berbagai perangkat dan infrastruktur (Nurdiyansyah et al. 2023). Menurut Maulana et al., (2024) energi listrik disebut sebagai penggerak kesejahteraan dan kemajuan ekonomi nasional, serta mesin pertumbuhan baik di dalam negeri maupun internasional.

The International Energy Agency (IEA) menyoroti bahwa sektor energi khususnya listrik memegang peranan penting dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara (Cozzi, 2021). Sektor kelistrikan mengalami pertumbuhan yang stabil, didorong oleh pertumbuhan jumlah penduduk dan meningkatnya permintaan listrik akibat meningkatnya aktivitas dan infrastruktur. Pada tahun 2018, kapasitas pembangkitan listrik Indonesia mencapai 64,5 GW, meningkat 3% dibandingkan kapasitas pada tahun 2017. Sehingga penting untuk memperhatikan penyedia layanan listrik seperti sistem pembangkit, transmisi, dan distribusi mengeloal energi listrik dapat disalurkan merata di setiap wilayah. Salah satu perusahaan yang bergerak pada bidang kelistrikan adalah PLN.

Perusahaan Layanan Listrik Negara (PLN) adalah badan usaha milik negara yang bertanggung jawab dalam penyediaan, distribusi, dan pengelolaan pasokan listrik di Indonesia. Sebagai perusahaan layanan jasa memegang peranan penting dalam perekonomian karena PLN berkomitmen untuk menyediakan layanan listrik yang aman,

andal, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia. PLN berkaitan dengan setiap masyarakat karena pemenuhan listrik pada masyarakat tidak lepas dari penerapan ekonomi. Penerapan ekonomi perusahaan berfokus pada pengelolaan sumber daya secara efisien untuk mencapai tujuan perusahaan, seperti profitabilitas dan pertumbuhan (Imsar, I., & Harahap, 2023). Pemahaman yang baik tentang ekonomi perusahaan, suatu entitas dapat mengoptimalkan operasionalnya, meningkatkan daya saing, dan meminimalkan risiko keuangan yang dihadapi.

Indonesia merupakan Negara yang religius. Sebagai Negara religius, Indonesia mengakui identitas agama bagi warganya. Ada enam identitas agama yang diakui Negara yakni Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Melansir dari data World Population Review, Indonesia menjadi negara dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak kedua di dunia. Total ada sekitar 236 juta penduduk di Indonesia yang memeluk agama Islam (cnbcindonesia, 2024). Sebagai negara penganut muslim mayoritas membuat ketertarikan konsep ekonomi syariah. Dilansir oleh Kementerian koordinasi ekonomi Indonesia (2021) aset keuangan syariah di Indonesia menempati peringkat 7 dunia dengan total aset sebesar US\$99 miliar. Ekonomi Islam merupakan suatu istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan suatu sistem ekonomi yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits (Fitria, T. N., & Prastiwi, 2020).

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka peneliti tertarik mengkaji lebih dalam terkait penerapan ekonomi syariah di PLN.

METODOLOGI

Sumber Data

Data di peroleh dari studi pustaka atau bahan informasi lain yang berhubungan dengan masalah yang akan di teliti, seperti catatan-catatan, buku-buku literatur, dokumen, laporan dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian.

Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, dimana perumusan masalah dalam penelitian kualitatif didapatkan karena adanya penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan, antara apa yang direncanakan dengan kenyataan, adanya pengaduan, dan kompetensi.

Penelitian kualitatif menggunakan berbagai jenis studi kualitatif dalam mengumpulkan data seperti: narasi, publikasi teks, dan lain-lain. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari foto, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya. Untuk mencapai tujuan penelitian kualitatif, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data tidak terbatas pada observasi saja tetapi juga dokumen, karya-karya tulis subjek, publikasi teks, dan lain-lain. Pada penulisan laporan, peneliti menganalisis data secara menyeluruh, luas dan mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi Syariah

Pembangunan ekonomi sering disamakan dengan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi melihat peningkatan ekonomi dari segi kualitas manusia, sedangkan pertumbuhan ekonomi didasarkan pada kuantitas variabel yang digunakan dalam peningkatan ekonomi. Perbedaan lainnya adalah pembangunan dila kukan dalam

rangka peningkatan kualitas produk dan jumlah produksi serta kualitas sumber daya manusia yang melakukan produksi. Sementara itu, proses pertumbuhan dilakukan hanya dalam peningkatan jumlah produksi tanpa melihat siapa yang melakukan produksi dan siapa yang berkontribusi (Nashoh et al, 2024).

Pemikir ekonomi Islam pada umumnya melihat peran penting negara dalam misi menegakkan keadilan sosial dan ekonomi. Dalam konteks Indonesia, keadilan sosial melahirkan gagasan kesejahteraan sosial. Dalam Islam terdapat simbol aksiologis mengenai model negara dalam kaitannya dengan ekonomi, yaitu istilah *baladun thoyyibatun wa rabbun ghofur*. *Thoyyibatun* dalam konteks modern diartikan sebagai kesejahteraan, sedangkan *rabbun ghafur* adalah negara aman yang terhindar dari bencana, kerusakan, dan segala bentuk ketidakadilan yang bertentangan dengan keadilan. Dari konsep tersebut, negara atau pemerintahan memerlukan upaya pengelolaan negara yang baik dalam bentuk pembangunan negara. Pembangunan dalam ekonomi syariah setidaknya memiliki tiga arah pembangunan, yaitu *people oriented*, *masalah oriented*, dan *falah oriented* (Mahri, 2021).

a. *People-oriented* (*people-centred*)

Orientasi pertama dari ekonomi pembangunan Islam adalah pembangunan yang berbasiskan pada kepentingan manusia (*people-centered*).

b. *Maslahah Oriented*

Maslahah Oriented merupakan kelanjutan dari arah pertama ekonomi pembangunan Islam. Kemaslahatan pembangunan hendaknya tidak hanya memberi manfaat kepada segelintir orang saja, tetapi juga harus diarahkan pada kesejahteraan umum (*maslahat*) dan bukan pada tujuan merugikan orang lain.

c. *Falah Oriented*

Dalam bahasa, *falah* diartikan sebagai kemenangan. Kemenangan dalam konteks ini adalah kemenangan di dunia dan akhirat.

Sebagai badan usaha milik negara yang memiliki tanggung jawab besar dalam penyediaan energi, PLN dapat diintegrasikan dengan model pembiayaan dan investasi syariah untuk memperluas akses pembiayaan yang berkelanjutan dan sesuai dengan nilai Islam. Pemerintah melalui kebijakan dan regulasi dapat mendukung pengembangan ekonomi syariah. Selain itu, pemerintah juga dapat memfasilitasi kerjasama antara PLN dan lembaga keuangan syariah guna mengimplementasikan prinsip syariah dalam operasional. Mengingat Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar yaitu sekitar 86,7% atau 237 juta jiwa dan jumlah institusi keuangan syariah terbanyak di dunia (www.kemenkeu.go.id). Ekonomi syariah menjadi sebuah keuntungan komparatif yang dimiliki oleh Indonesia. Diperkuat dengan pernyataan Airlangga yang mencatat kontribusi ekonomi syariah terhadap PDB telah mencapai 48,71% (www.tempo.co).

Implementasi Ekonomi Syariah di PLN

Etika dalam Islam dipandang sebagai produk dari keimanan, hukum syariah Islam, dan *taqwa* yang didasarkan pada keyakinan yang kuat terhadap kebenaran Allah SWT. Etika bisnis dalam Islam berfungsi sebagai pengendali (pengatur) kegiatan ekonomi para pedagang karena filsafat etika didasarkan pada penalaran ilmiah dan agama untuk menilai. Penerapan etika bisnis Islam yang efektif mengarah pada pola pengembangan karakter mulia dalam perilaku para pengusaha atau sumber daya manusia dan pemangku kepentingan dengan menerapkan prinsip-prinsip dan standar etika bisnis. Sistem bisnis perusahaan mengacu kepadanya agar sesuai dengan etika bisnis Islam.

Seluruh komponen yang terkait dengan perusahaan harus terlaksana dengan baik dan optimal. Berdasarkan kelima aksioma etika bisnis Islam tersebut, maka perusahaan akan terhindar dari kegiatan-kegiatan yang tidak diperbolehkan dalam Islam atau kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan hukum syariah (Wahyu, 2024).

PLN senantiasa mengacu pada nilai-nilai inti bisnis atau budaya perusahaan AKHLAK, sebagai landasan dalam berinteraksi dengan semua pihak dan menjadi inspirasi serta acuan pola pikir setiap insan Perusahaan. AKHLAK (Amanah, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) merupakan bagian dari implementasi program transformasi PLN. Amanah berarti memastikan transparansi dan kejujuran dalam pengelolaan sumber daya dan pembiayaan proyek-proyek yang mendukung pembangunan infrastruktur kelistrikan. Harmonis mencerminkan prinsip syariah dalam keseimbangan dan keadilan transaksi. Loyal berarti memberikan pelayanan terbaik. Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung kerja sama dan mengurangi perselisihan.

Selain itu, perilaku BERSIH di PLN terus tumbuh dan ditingkatkan. Momentum ini diawali dengan dicanangkannya PLN Bersih, Bebas Suap pada Desember 2012, diterbitkannya Peraturan Direksi PT PLN (Persero) kemudian secara resmi dilaksanakan kegiatan edukasi antikorupsi bagi insan PLN, Pelaporan LHKPN, Pengendalian Gratifikasi, Pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System), dan penerapan tata kelola antisuap sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direksi PT PLN (Persero). Hal tersebut menunjukkan bahwa perilaku bebas suap merupakan salah satu aspek dalam penerapan ekonomi syariah, karena dalam ekonomi syariah secara tegas melarang segala bentuk transaksi yang tidak adil atau merugikan, termasuk praktik suap.

Implementasi ekonomi syariah di perusahaan PLN juga tercermin dalam proyek-proyek yang menggunakan prinsip syariah, yaitu PLTU dan PLTMG: PLTU Lombok FTP 2 (100 MW), PLTMG Sumbagut 2 Peaker (250 MW), PLTMG Bangkanai 2 (140 MW), PLTMG Lombok Peaker (130-150 MW). Proyek tersebut menggunakan pembiayaan investasi dalam skema syariah dengan besaran Rp2,84 triliun.

Faktor Penghambat dan Pendorong Penerapan Ekonomi Syariah

Faktor penghambat implementasi penerapan ekonomi syariah antara lain masih terbatasnya pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi mengenai prinsip-prinsip syariah yang lebih mendalam. Selain itu kurangnya infrastruktur dan fasilitas yang mendukung, seperti lembaga keuangan syariah yang tersebar merata, juga menjadi tantangan besar dalam implementasinya (Mutafarida, B., & Anam, 2020). Kurangnya riset dan pengembangan produk yang sesuai dengan prinsip syariah juga dapat menyebabkan rendahnya inovasi dalam sektor ekonomi syariah (Lestari, 2020). Tantangan hambatan implementasi syariah perlu didorong oleh peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keberlanjutan dan keadilan dalam transaksi ekonomi (Kurnia et al. 2023). Dukungan dari pemerintah melalui regulasi yang mendukung ekonomi syariah juga memainkan peran penting dalam mempercepat penerapannya (Hasan et al. 2024).

KESIMPULAN

Pemerintahan memerlukan upaya pengelolaan negara yang baik dalam bentuk pembangunan negara. Pembangunan dalam ekonomi syariah setidaknya memiliki tiga arah pembangunan, yaitu people oriented, masalah oriented, dan falah oriented. PLN senantiasa mengacu pada nilai-nilai inti bisnis atau budaya perusahaan AKHLAK, sebagai landasan dalam berinteraksi dengan semua pihak dan menjadi inspirasi serta acuan pola pikir setiap

insan perusahaan. Implementasi ekonomi syariah di perusahaan PLN juga tercermin dalam proyek-proyek yang menggunakan prinsip syariah. Proyek tersebut menggunakan pembiayaan investasi dalam skema syariah dengan besaran Rp2,84 triliun.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitria, T. N., & Prastiwi, I. E. (2020). Budaya Hedonisme Dan Konsumtif Dalam Berbelanja Online Ditinjau Dari Perpektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 731-736.
- Hasan, A., Nurfitriani, A., Rachman, H. P., Putra, R. W., & Fadhillah, M. F. (2024). Peran Pemerintah Dalam Memajukan Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(17), 187-196.
- <https://Web.Pln.Co.Id/Cms/Media/Siaran-Pers/2019/12/Genjot-Proyek-35-000-Mw-Pln-Peroleh-Dana-Rp7-91-Trilyun-Dari-Sindikasi-Perbankan-Nasional/>
- <https://Www.Ekon.Go.Id/Publikasi/Detail/2943/Potensi-Besar-Ekonomi-Berbasis-Syariah>
- <https://Www.Kemenkeu.Go.Id/Informasi-Publik/Publikasi/Berita-Utama/Pemerintah-Dukung-Perkembangan-Ekonomi-Syariah>
- <https://Www.Tempo.Co/Ekonomi/Berkontribusi-Signifikan-Terhadap-Pdb-Bi-Ungkap-4-Strategi-Genjot-Ekonomi-Syariah-Indonesia-1161819>
- Imsar, I., & Harahap, A. A. (2023). Implementasi Pendekatan Ekonomi Manajerial Berbasis Keislaman Dalam Pengembangan Kinerja Bisnis. *Hikmah*, 20(2), 189-201.
- Kurnia, E., Parmitasari, R. D. A., & Abdullah, M. W. (2023). Tinjauan Mendalam Terhadap Dinamika Lembaga Keuangan Syariah: Masa Depan, Tantangan, Dan Inovasi. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 1(5), 292-303.
- Lestari, F. D. (2020). Analisis Fishbone Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Rendahnya Antusiasme Masyarakat Terhadap Asuransi Syariah Di Indonesia. *Journal Of Islamic Business Management Studies (Jibms)*, 1(1), 13-22.
- Mahri, A. J. W., & Dkk. (2021). *Ekonomi Pembangunan Islam*. Departemen Ekonomi Dankeuangan Syariah Bank Indonesia.
- Mutafarida, B., & Anam, C. (2020). Prinsip Ekonomi Syariah, Implementasi, Hambatan Dan Solusinya Dalam Realitas Politik Indonesia Terkini. *Juornal Of Economics And Policy Studies*, 1(1), 1-13.
- Nashoh, H., Nafis, A. W., & Is'adi, M. (2024). A Philosophical Overview Of The Government's Role In The Development And Development Of The Sharia Economy. *Dinasti International Journal Of Economics, Finance & Accounting*, 5(1), 111-120.
- Wahyu, Mijil Sampurno. 2024. Implementation Of Islamic Business Ethics And Its Impacts On Family Business. *Journal Of Islamic Economics Lariba* (2016). Vol. 2, Issue 1: 25-30